

ABSTRAK

Dari Pendapatan Asli Daerah Dinas Perhubungan Kota Bogor masih ada yang belum terpenuhi yaitu Retribusi Izin Trayek dikarenakan adanya pengurangan objek pada retribusi sebagai akibat Program Rasionalisasi dari Tahun 2021 sampai tahun 2022 hal ini disebabkan karena adanya angkutan yang telah melebihi batas umur operasional sebagai angkutan umum dan tidak melaksanakan uji berkala serta perpanjangan IPAP (Izin Penyelenggaraan Angkutan Penumpang). Dengan kurangnya pengawasan yang efektif juga dapat menyebabkan kesulitan dalam mengidentifikasi pelanggaran dan memastikan bahwa operator angkutan umum mematuhi kewajiban dalam pembayaran retribusinya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh Pengawasan Intern Terhadap Efektivitas Retribusi Izin Trayek di Dinas Perhubungan Kota Bogor. Peneliti menggunakan teori Pengawasan Intern yang dirumuskan oleh Mulyadi pada tahun 2013. Teori ini terdiri dari 3 dimensi yaitu pengendalian lingkungan, aktivitas pengendalian, pemantauan sedangkan efektivitas menggunakan teori Adam Ibrahim Indra Wijaya pada tahun 2010 yang terdiri 3 dimensi yaitu tepat waktu, tepat kuantitas dan tepat kualitas.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disebar kepada 30 responden. Pengujian statistik yang digunakan yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear sederhana, uji parsial uji (t) dan analisis koefisien determinasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh pada pengawasan intern terhadap efektivitas retribusi izin trayek di dinas perhubungan kota bogor memiliki nilai R Square sebanyak 53,1%. Data tersebut mengindikasikan bahwa pengawasan intern memiliki pengaruh yang signifikan sebesar 53,1% terhadap efektivitas. Sedangkan sisanya 46,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti.

Kata Kunci : Pengawasan Intern, Efektivitas, Retribusi Izin Trayek

ABSTRACT

From the Regional Original Revenue of the Bogor City Transportation Service, there is still something that has not been fulfilled, namely the Route Permit Levy due to the reduction in objects in the levy as a result of the Rationalization Program from 2021 to 2022. This is due to the existence of transport that has exceeded the operational age limit of public transport and has not carried out tests periodically and extend the IPAP (Passenger Transport Operation Permit). A lack of effective supervision can also cause difficulties in identifying violations and ensuring that public transport operators comply with their levy payment obligations.

The aim of this research is to identify the influence of Internal Supervision on the Effectiveness of Route Permit Retribution at the Bogor City Transportation Service. Researchers use the Internal Supervision theory formulated by Mulyadi in 2013. This theory consists of 3 dimensions, namely environmental control, control activities, monitoring, while effectiveness uses Adam Ibrahim Indra Wijaya's theory in 2010, which consists of 3 dimensions, namely timely, precise quantity and precise quality

The research method used is an associative method with a quantitative approach. The data collection technique used a questionnaire distributed to 30 respondents. The statistical tests used are validity test, reliability test, classical assumption test, simple linear regression analysis, partial test (t) and coefficient of determination analysis.

The results of this research show that there is an influence on internal supervision on the effectiveness of route permit levies in the Bogor City Transportation Department, which has an R Square value of 53.1%. These data indicate that internal supervision has a significant influence of 53.1% on effectiveness. Meanwhile, the remaining 46.9% was influenced by other variables not examined by researchers.

Keywords: Internal Supervision, Effectiveness, Route Permit Retribution